

2025

RENCANA KERJA



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

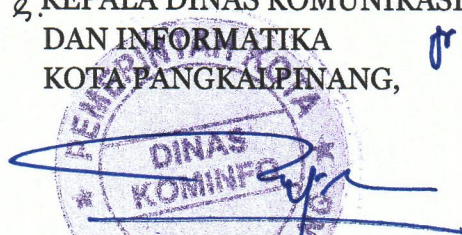
Mendasari ketentuan Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Mei 2024

2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG,



FEBRI YANTO, S.IP., M. Si., M.H.

Pembina/IV.a

NIP. 19880215 201010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran	33
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	44
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	9
Tabel 2.2	20
Tabel 2.3	24
Tabel 3.1	34
Tabel 3.2	37
Tabel 4.1	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesungguhnya Rencana Kerja (Renja) merupakan cerminan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dankeberpihakan stakeholders terhadap masyarakat. Rencana Kerja menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Rencana Kerja akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja 2025 akan menghasilkan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025

sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatat dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6402);
 16. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penetapan Standar pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;

26. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Pemerintah daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang No.9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk menyusun perencanaan program/kegiatan tahunan yang akan menjadi masukan dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjadikan panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta rencana program dan kegiatan 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja merupakan bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan target capaian kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024. Target capaian kinerja ini merupakan target capaian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis. Realisasi capaian yang menjadi tolak ukur pada evaluasi ini, diawali dari tahun sebelumnya yang selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun untuk memberikan dasar dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahun sebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penentuan target menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan: NILAI)	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		4,179,695,400	3,709,061,374	4,895,683,427	4,726,265,936	97%	4,263,409,371	12,631,416,681	302%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: NILAI)										
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	3,400,000,000	3,187,463,192	2,989,646,961	2,944,360,152	98%	3,255,678,337	9,387,501,681	276%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	3,400,000,000	3,186,503,192	2,989,646,961	2,944,360,152	98.49%	3,252,694,737	9,383,558,081	276%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	360,000	-	-	0.00%	987,200	1,347,200	0%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	-	300,000	-	-	0.00%	998,000	1,298,000	0%
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan: Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	300,000	-	-	0.0%	998,400	1,298,400	0%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran disiplin (Dengan Satuan: %)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	-	-	121,500,000	120,400,000	99%	100,400,000	220,800,000	0%
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (3 Jenis Pakaian Kerja)	-	-	31,500,000	30,400,000	97%	50,400,000	80,800,000	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat sesuai Tupoksi	-	-	90,000,000	90,000,000	100%	50,000,000	140,000,000	0%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum	184,231,400	128,369,850	863,783,139	781,099,596	90%	207,589,400	1,117,058,846	606%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2,995,300	13,082,500	33,891,050	30,166,879	89%	5,299,600	48,548,979	1621%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	501,675,529	427,870,000	85%	-	427,870,000	0%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan Penyediaan ATK, Makanan dan Minuman yang tertangani	24,636,400	23,007,650	58,240,660	55,108,967	95%	37,318,800	115,435,417	469%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2,999,700	3,279,700	16,375,900	14,953,750	91%	11,371,000	29,604,450	987%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3,600,000	3,000,000	3,600,000	3,000,000	83%	3,600,000	9,600,000	267%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	150,000,000	86,000,000	250,000,000	250,000,000	100%	150,000,000	486,000,000	324%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	-	-	109,000,000	106,820,000	98%	-	39,500,000	0%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	69,000,000	67,320,000	98%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	40,000,000	39,500,000	99%	-	39,500,000	0%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa	445,224,000	286,156,544	409,400,706	387,963,256	95%	486,530,012	1,160,649,812	261%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	-	48,200,000	70,865,088	69,815,088	99%	69,815,088	187,830,176	0%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani	136,000,000	65,653,544	116,611,950	99,966,600	86%	125,452,164	291,072,308	214%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7,000,000	7,570,000	13,277,000	11,001,500	83%	29,500,000	48,071,500	687%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani	302,224,000	164,733,000	208,646,668	207,180,068	99%	261,762,760	633,675,828	210%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	150,240,000	107,071,788	402,352,621	385,622,932	96%	213,211,622	705,906,342	470%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	119,920,000	82,178,788	121,629,000	108,865,161	90%	137,700,800	328,743,949	274%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibiayai/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	21,100,000	259,620,496	258,030,696	99%	21,336,622	300,467,318	0%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	30,320,000	3,793,000	21,103,125	18,727,075	89%	54,175,000	76,695,075	253%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Program Informasi dan Komunikasi Publik.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	2,869,987,000	430,666,338	7,157,974,760	6,896,840,723	96%	3,896,194,889	11,191,726,950	390%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Keasasan Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	2,869,987,000	430,666,338	7,157,974,760	6,896,840,723	96%	3,896,194,889	11,191,726,950	390%
2.16.02.2.01.02	-	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen isu strategis yang direkomendasikan, jumlah aduan yang masuk dalam SP4N dan	-	81,350,814	69,990,192	62,205,037	89%	87,213,392	230,769,243	0%
2.16.02.2.01.04	-	-	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	136,306,650	6,564,139,480	6,389,816,042	97%	3,440,691,409	9,966,814,101	0%
2.16.02.2.01.06/07	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelayanan Informasi Publik	Persentase desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.	325,050,000	213,008,874	523,845,088	444,819,644	85%	336,315,088	994,143,606	306%
2.16.02.2.01.10	-	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase pengelolaan layanan hubungan dengan media	-	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.02.2.01.24	Pengujian Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	-	-	50,000,000	-	-	-	0%	31,975,000	31,975,000	0%
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	-	72,625,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ukrns (Satuan:	-	-	2,422,312,000	-	-	-	0%	-	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	Program Aplikasi Informatika.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo.	3,774,106,856	1,127,940,930	4,535,275,888	4,428,090,299	98%	4,754,668,836	10,279,274,115	272%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	47,190,000	506,818,000	2,593,583,392	2,592,792,397	100%	3,068,301,342	6,167,911,739	13070%
2.16.03.2.01.02	-	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-	50,659,000	73,583,392	72,793,392	99%	68,301,342	191,753,734	0%
2.16.03.2.01.03	-	-	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase titik jaringan intra pemerintah yang terkoneksi pada perangkat daerah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	-	456,159,000	2,520,000,000	2,519,999,005	100%	3,000,000,000	5,976,158,005	0%
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	-	-	47,190,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.	3,726,916,856	621,122,930	1,941,692,496	1,835,297,902	95%	1,686,367,494	4,111,362,376	110%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.03.2.02.01			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	-	-	-	-	0%	31,425,950	31,425,950	0%
2.16.03.2.02.02			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah regulasi penyelenggaraan e-government	-	50,707,230	49,499,800	43,118,340	87%	83,073,400	176,898,970	0%
2.16.03.2.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data dan menyimpan di pusat data Pemerintah	-	137,552,100	349,133,392	344,747,117	99%	217,543,392	699,842,609	0%
2.16.03.2.02.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	49,994,750	47,793,000	96%	14,094,500	61,887,500	0%
2.16.03.2.02.06			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	-	49,994,790	40,165,068	80%	30,675,900	70,840,568	0%
2.16.03.2.02.07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.	-	90,471,000	419,609,804	419,309,804	100%	530,053,072	1,039,833,876	0%
2.16.03.2.02.08			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.	-	-	637,906,904	597,306,742	94%	457,034,584	1,054,341,326	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.16.03.2.02.10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase OPD yang Memanfaatkan Sumber Daya TIK untuk mendukung terselenggaranya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	-	342,392,600	335,553,496	311,786,096	93%	301,653,496	955,832,192	0%
2.16.03.2.02.12			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen movev untuk mendukung implementasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	50,000,000	31,071,735	62%	20,813,600	51,885,335	0%
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	-	-	95,395,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	-	-	531,521,856	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulnkan (Satuan: Dokumen)	-	-	100,000,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	-	-	3,000,000,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	196,145,000	211,676,145	98,870,692	95,786,343	97%	105,211,542	412,674,030	210%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuangan Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	196,145,000	211,676,145	98,870,692	95,786,343	97%	105,211,542	412,674,030	210%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengetahuan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan	-	211,676,145	83,489,942	82,228,589	98%	90,289,142	384,193,876	0%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	-	-	15,380,750	13,557,754	0%	14,922,400	28,480,154	0%
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	-	-	147,775,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	-	-	48,370,000	-	-	-	0%	-	-	0%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	187,710,000	25,445,000	211,419,435	113,794,520	54%	98,685,546	237,925,066	127%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI).	94,265,000	-	161,323,035	66,554,977	41%	46,301,450	112,856,427	120%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola	44,265,000	-	25,355,000	13,910,000	0%	23,575,000	37,485,000	85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2025)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (2021-2024)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output) (2021-2023)	Target Kinerja Capaian Program pada Renstra tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 = (7+9+11)	13 = (12/6)
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yg dipergunakan	50,000,000	-	135,968,035	52,644,977	0%	22,726,450	75,371,427	151%
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan	93,445,000	25,445,000	50,096,400	47,239,543	94%	52,384,096	125,068,639	134%
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui pengamanan sinyal.	93,445,000	25,445,000	50,096,400	47,239,543	94%	52,384,096	125,068,639	134%
TOTAL					11,207,644,256	5,504,789,787	16,899,224,202	16,260,777,821	96%	13,118,170,184	34,753,016,842	310%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Hal ini dilakukan dengan menentukan indikator kinerja umum sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di tuangkan dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Pencapaian ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar sebagai pertimbangan dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.6	2.8	3	2.2	2.87	2.6	2.8	3
	Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didistribusikan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persen	100	100	100	NA	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100	100	100	NA	100	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Perubahan ekonomi pasca-pandemi berdampak pada perencanaan dan penganggaran;
- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah;
- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistik terintegrasi belum optimal.

b. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;
- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan

ekonomi. Distribusi sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.;

- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Masterplan Smart City Daerah Kota Pangkalpinang kota cerdas, rencana strategis dan anggaran pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK;
- Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic;
- Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public pasca-pandemi
- Penyelenggaraan pelayanan public, beberapa diantaranya sudah menggunakan system elektronik.
- kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistik terintegrasi belum optimal.

d. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersediaan data sesuai prinsip satu data Indonesia,

berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;

- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;
- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;
- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang merupakan review terhadap program dan anggaran pada tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Review ini diiringi dengan penentuan target dari indikator program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari target yang ditentukan terdapat jumlah pagu indikatif. Pagu indikatif ini dapat dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh program dan kegiatan. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkalpinang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan: NILAI)	77.86	4,179,695,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkalpinang	77.86	4,179,695,400
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: NILAI)	75				75	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	100	3,400,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	100	3,400,000,000
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	33	3,400,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	33	3,400,000,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan: %)	100	184,231,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkalpinang	100	184,231,400
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	2,995,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang	1	2,995,300
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	24,636,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang	1	24,636,400

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pangkalpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.999.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pangkalpinang	1	2.999.700
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkalpinang	360	3.600.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	150.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	445.224.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	100	445.224.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	136.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang	1	136.000.000
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang	1	7.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	302.224.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpinang	1	302.224.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	150.240.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	100	150.240.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	119.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang	3	119.920.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	30.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang	1	30.320.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pangkalpinang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	2.869.987.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pangkalpinang	100	2.869.987.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100	2.869.987.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	100	2.869.987.000
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	325.050.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pangkalpinang	10	325.050.000
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	72.625.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkalpinang	10	72.625.000
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	2.422.312.000	Pelayanan Informasi Publik	Pangkalpinang	140	2.422.312.000
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	5	50.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pangkalpinang	5	50.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pangkalpinang	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3,774,106,856	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pangkalpinang	100	3,774,106,856
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	50	47,190,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	50	47,190,000
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	47,190,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	1	47,190,000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	25	3,726,916,856	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	25	3,726,916,856
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	95,395,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	2	95,395,000
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	531,521,856	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pangkalpinang	1	531,521,856

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	100.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	1	100.000.000
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pangkalpinang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	67	3.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Pangkalpinang	67	3.000.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	30	196.145.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pangkalpinang	30	196.145.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	90	196.145.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	90	196.145.000
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Pangkalpinang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	147.775.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pangkalpinang	100	147.775.000
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pangkalpinang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	48.370.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pangkalpinang	3	48.370.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pangkalpinang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	187.710.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pangkalpinang	100	187.710.000

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100	94,265,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	100	94,265,000
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	44,265,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	1	44,265,000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	50,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkalpinang	1	50,000,000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	21	93,445,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	21	93,445,000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	93,445,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	7	93,445,000
				11,207,644,256				11,207,644,256	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menentukan program, kegiatan, indikator program dan pagu indikatif dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pagu indikatif usulan program 2025 ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan alokasi dana yang dibutuhkan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencn Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastutur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan peerintah indonesia tahun 2019-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan digital wilayah indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah indonesia dengan jaringan infrastuktur pitalebar (Palapa Ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5. Interolensasi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah indonesia, antara lain:

- 1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
- 2) Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
- 3) Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
- 4) Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastuktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika anantara lain :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman ;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 (empat) fokus utama, yaitu :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastuktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan startegi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	Indeks	NA	2,6	2,8	3
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didesiminasikan dengan baik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo terkait penyampaian data dan informasi penyelenggaraan tahun berkenaan/jumlah kegiatan terkait penyampaian data dan informasi yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan x 100%	Persen	NA	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem IT dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik/jumlah perangkat daerah x 100%	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang telah mengumpulkan, mengupdate dan memanfaatkan website data statistik daerah terpadu (https://data.pangkajeneid.go.id) dalam menyusun perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Persen	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk perwujudan dari strategi dan kebijakan yang telah ditentukan. Rencana Kerja 2025 mengarahkan program dan kegiatan dalam bentuk sebagai berikut :

- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju terlampir dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2,16,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkalpinang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan: NILAI)	77.91	4,179,695,400	APBD		77.96	5,251,031,612	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: NILAI)	76				77		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3,400,000,000	APBD		100	3,938,115,799	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	33	3,400,000,000	APBD		33	3,938,115,799	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	184,231,400	APBD		100	219,403,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,995,300	APBD		1	5,303,000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24,636,400	APBD		1	30,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pangkalpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,999,700	APBD		1	5,000,000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3,600,000	APBD		360	3,600,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000	APBD		1	175,000,000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	445,224,000	APBD		100	471,144,500	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	136,000,000	APBD		1	136,000,000	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	7,000,000	APBD		1	9,944,500	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	302,224,000	APBD		1	325,200,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	150,240,000	APBD		100	156,629,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	119,920,000	APBD		3	121,629,000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	30,320,000	APBD		1	35,000,000	
2,16,02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pangkalpinang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	2,869,987,000	APBD		100	3,935,775,480	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100	2,869,987,000	APBD		100	3,935,775,480	
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	325,050,000	APBD		1	250,050,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	72,625,000	APBD		1	95,625,000	
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	2,422,312,000	APBD		1	3,090,150,480	
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pangkalpinang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	5	50,000,000	APBD		12	750,000,000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pangkalpinang	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3,774,106,856	APBD		100	3,910,458,392	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	47,190,000	APBD		90	62,333,392	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	47,190,000	4		1	62,333,392	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	3,726,916,856	APBD		75	3,848,125,000	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	95,395,000	APBD		1	125,000,000	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	531,521,856	APBD		1	573,125,000	
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	100,000,000	APBD		1	150,000,000	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pangkalpinang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	67	3,000,000,000	APBD		1	3,000,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2,20,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	60	196,145,000	APBD		70	200,000,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	100	196,145,000	APBD		100	200,000,000	
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Pangkalpinang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	147,775,000	APBD		1	150,000,000	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pangkalpinang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	48,370,000	APBD		3	50,000,000	
2,21,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pangkalpinang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	187,710,000	APBD		100	195,500,000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100	94,265,000	APBD		100	100,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)		Daftar Tambahan
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	44,265,000	APBD		1	50,000,000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	27	93,445,000	APBD		30	95,500,000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	93,445,000	APBD		10	95,500,000	
				11,207,644,256				13,492,765,484		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan bentuk perencanaan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang pada belanja yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANGTAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiraan Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Pangkalpinang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77.91			Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77.91	4,179,695,400	5,251,031,612		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	76			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	76				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100			Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3,400,000,000	3,938,115,799		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pangkalpinang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	3,400,000,000	3,938,115,799		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100			Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	184,231,400	219,403,000		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,995,300	5,303,000		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24,636,400	30,500,000		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,999,700	5,000,000		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3,600,000	3,600,000		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000	175,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pangkalpinang	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)			100	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	445,224,000	471,144,500		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	136,000,000	136,000,000		
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan)	1	7,000,000	9,944,500		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	302,224,000	325,200,000		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pangkalpinang			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	150,240,000	156,629,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pangkalpinang			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	119.920.000	121.629.000		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pangkalpinang			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	30.320.000	35.000.000		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Pangkalpinang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	2.869.987.000	3.935.775.480		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai	100			Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah	100	2.869.987.000	3.935.775.480		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
					dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)				Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)					
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik			Pangkalpinang			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	325.050.000	250.050.000		
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik			Pangkalpinang			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	72.625.000	95.625.000		
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Pangkalpinang			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	2.422.312.000	3.090.150.480		
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Pangkalpinang			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti	5	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti	5	50.000.000	750.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
							bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)		bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)					
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Pangkalpinang	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3,774,106,856	3,910,458,392		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	47,190,000	62,333,392		
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			Pangkalpinang			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	47,190,000	62,333,392		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiraan Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	3,726,916,856	3,848,125,000		
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Pangkalpinang			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	95,395,000	125,000,000		
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			Pangkalpinang			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	531,521,856	573,125,000		
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			Pangkalpinang			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	100,000,000	150,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			Pangkalpinang			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	67	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	67	3.000.000.000	3.000.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	60			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	60	196.145.000	200.000.000		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	100	196.145.000	200.000.000		
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral						Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	147.775.000	150.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia						Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	48,370,000	50,000,000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Pangkalpinang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	187,710,000	195,500,000		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100			Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100	94,265,000	100,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi Detail	Hasil Progres		keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif 2025	Prakiran Maju 2026	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja			SKPD 1/2/3	Jenis Kegiatan a/b/c
(1)	(2)				(3)	(5)	(3)	(5)	(3)	(5)	(6)	(10)		(11)
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	44,265,000	50,000,000		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	50,000,000	50,000,000		
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	27	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	27	93,445,000	95,500,000		
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	93,445,000	95,500,000		
											11,207,644,256	13,492,765,484		

BAB V

PENUTUP

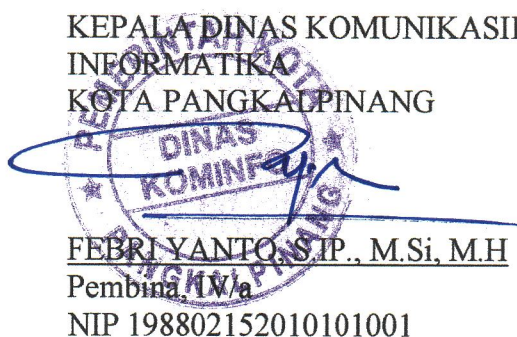
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 masih mengacu kepada rencana Strategis 2024-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan *Good Governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang khususnya dan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada umumnya. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pangkalpinang, Mei 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG



FEBRI YANTO, S.IP., M.Si, M.H
Pembina IV/a
NIP 198802152010101001